



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**IMPLEMENTASI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM
PENGENDALIAN MASSA OLEH SATUAN SAMAPTA POLRI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

AULIA NUR RIZQIANANTO
NPM. 221003742019379

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

IMPLEMENTASI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGENDALIAN MASSA
OLEH SATUAN SAMAPTA POLRI TRANSAKSI E-COMMERCE

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
AULIA NUR RIZQIANANTO
NPM : 221003742019379

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. SRI WULANDARI, SH.,MHUM.,MKN
NUPTK : 9562743644230083

Anggota,

PROF. DR. SIGIT IRIANTO, SH.MHUM
NUPTK : 1445740641130072

Anggota,

DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH.MH
NUPTK :5441745646130083



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY ISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Surat Pernyataan Bebas Plagiat	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
Abstrak	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	14
C. Perumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Kegunaan Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A Tinjauan Umum.....	17
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	17
2. Pengertian Pengendalian Massa	22
3. Tugas dan Wewenang POLRI.....	25

	B Tinjauan Khusus.....	27
	1. Pengertian Samapta POLRI.....	27
	2. Ruang Lingkup Samapta POLRI.....	28
BA III	METODE PENELITIAN.....	30
	A. Tipe Penelitian.....	30
	B. Spesifikasi Penelitian.....	31
	C. Sumber Data.....	32
	D. Metode Pengumpulan Data.....	33
	E. Metode Penyajian Data.....	34
	F. Metode Analisa Data.....	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	35
	1. Implementasi Prinsip HAM dalam Pengendalian Massa Oleh Satuan Samapta POLRI.....	35
	2. Kendala-Kendala Dalam Implementasi Prinsip HAM dalam Pengendalian Massa Oleh Satuan Samapta POLRI.....	52
BAB V	PENUTUP.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Grafik Komnas HAM Reports of Excessive Force in Public Assemblies (2020-2023).....	36
Gambar 2. Tren Laporan Kekerasan Aparat dalam Aksi Massa (2019-2023)	43

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengendalian massa oleh Satuan Samapta POLRI, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik lapangan. Perlindungan terhadap hak atas kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari sistem hukum demokratis sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Selain itu, Indonesia sebagai negara pihak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa segala tindakan aparat keamanan selalu berlandaskan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sesuai standar *United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, standar HAM internasional, literatur akademik, serta laporan lembaga nasional dan internasional seperti Komnas HAM, Amnesty International, dan Human Rights Watch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah memuat ketentuan yang selaras dengan standar internasional, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Data Komnas HAM menunjukkan tren peningkatan pengaduan terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan aksi massa, yang mengindikasikan masih lemahnya penerapan prinsip HAM dalam tindakan pengamanan oleh Samapta POLRI. Kendala yang ditemukan antara lain disharmoni regulasi, keterbatasan sarana-prasarana, minimnya pelatihan HAM, budaya organisasi yang masih bercorak paramiliter, lemahnya mekanisme akuntabilitas, dan tekanan situasional maupun politik dalam pengendalian massa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan SOP Dalmas, penguatan pelatihan berbasis HAM, peningkatan transparansi pengawasan internal-eksternal, serta internalisasi pendekatan *democratic policing* sebagai paradigma baru dalam pengendalian massa yang menghormati harkat dan martabat manusia.

Kata kunci: *HAM; Pengendalian Massa; Samapta POLRI.*